



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Selasa, 1 Maret 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.30 WIB s.d 17.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Membahas tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK; 2. Potret dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2010; 3. Persiapan pelaksanaan APBN TA 2011; 4. Evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN TA 2011.
Ketua Rapat	: Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 13.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada hari ini adalah untuk membahas mengenai tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK; potret dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2010; persiapan pelaksanaan APBN TA 2011; dan evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN TA 2011.
3. Ketua mempersilakan kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mendesak KPDT untuk dapat menetapkan parameter secara kuantitatif terkait kriteria Daerah Tertinggal dibawah ini :
 - a. Kriteria Ekonomi;
 - b. Sumber daya manusia;
 - c. Aksesibilitas;

- d. Karakteristik Daerah;
- e. Celah Fiskal;
- f. Sarana dan Prasarana Daerah.

Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak kepada KPDT untuk menyampaikan perkembangan secara berkala atas capaian program/kegiatan yang berhasil mengentaskan daerah tertinggal kepada Komisi V DPR RI.

2. Terkait PHLN yang tidak terserap pada APBN TA 2010, yaitu sebesar 5% dari Total Anggaran KPDT, Komisi V DPR RI menegaskan kembali kepada KPDT untuk menelusuri program/kegiatan yang dibiayai oleh PHLN yang bermasalah, sehingga pada Tahun Anggaran berikutnya kejadian serupa tidak terulang dan tidak mengganggu program pengentasan Daerah Tertinggal.
3. Komisi V DPR RI mendesak KPDT untuk melaksanakan tindak lanjut dari semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan mendesak agar berupaya untuk meningkatkan status opini laporan keuangan KPDT menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.
4. Komisi V DPR RI mendesak KPDT untuk melengkapi kekurangan data yang disampaikan pada Rapat Kerja hari ini dan menyampaikan ke Komisi V DPR RI antara lain potret kinerja dan rincian program/kegiatan termasuk lokus (kabupaten/desa).
5. Komisi V DPR RI meminta KPDT untuk melakukan kajian pendekatan pembangunan daerah tertinggal berbasis desa tertinggal.
6. Komisi V DPR RI meminta KPDT untuk melakukan evaluasi atas Daftar Kabupaten Tertinggal dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran dan selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

ttd

IR. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

Jakarta, 1 Maret 2011

KETUA RAPAT,

ttd

Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

DIRUT PT. PELINDO I,

DIRUT PT. PELINDO III,

DIRUT PT. PELINDO IV,

HARRY SUTANTO

DJARWO SURJANTO

ALFRED NATSIR

PLH. DIRUT PT. ASDP
INDONESIA FERRY,

DIREKTUR KOMERSIAL DAN
PENGEMBANGAN USAHA PT. PELINDO II,

SIRAJUDDIN SAINI

SAPTONO R. IRIANTO

Jakarta, 31 Januari 2011,
KETUA RAPAT,

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

IR. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

Jakarta, 21 September 2010

KETUA RAPAT,

IR. H. MULYADI

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

**MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT**

K E T U A,

IR. A. HELMY FAISHAL ZAINI, SE

SOEHARSO MONOARFA, MA

.....

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

**KEPALA BADAN
SAR NASIONAL,**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
LUMPUR SIDOARJO,**

DR. IR. SRI WORO B. HARIJONO, MSC

MARSDYA. WARDJOKO

SOENARSO

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT,



DRS. SOEROYO ALIMOESO

KETUA RAPAT,

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT,

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA,

SUNARYO, SH

IR. HARRY BAKTI SINGAYUDA, MM

DIRJEN BINA MARGA,

DIRLANTAS MABES POLRI,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

IR. DJOKO MURJANTO, M.Sc

DRS. DJOKO SUSILO, SH, MSi

MARSDYA. WARDJOKO

